



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Bupati Klungkung nomor 180 / 0095 / HK, perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 untuk mendapat pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa perubahan maupun pencabutan peraturan daerah;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna Kedua Masa Persidang ke 2 (Dua) Tahun Sidang 2019, hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui 13 (tiga belas) usulan eksekutif dan 3 (tiga) usulan Ranperda dari DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan 13 (tiga belas) usulan eksekutif dan 3 (tiga) usulan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

KESATU : Menyetujui penetapan 16 (enam belas) Usulan Program Pembentukan Perda Kabupaten Klungkung tahun 2019, yaitu 13 (tiga belas) usulan eksekutif dan 3 (tiga) usulan Ranperda DPRD Kabupaten Klungkung, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak - Hak Disabilitas Kabupaten Klungkung.
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Kabupaten Layak Anak.
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Klungkung.

12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pinjaman Daerah.
13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyertaan Modal.
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Klungkung.
15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Ijin Usaha Konstruksi.
16. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Kepemudaan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 19 Pebruari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



IWAYAN BARU